

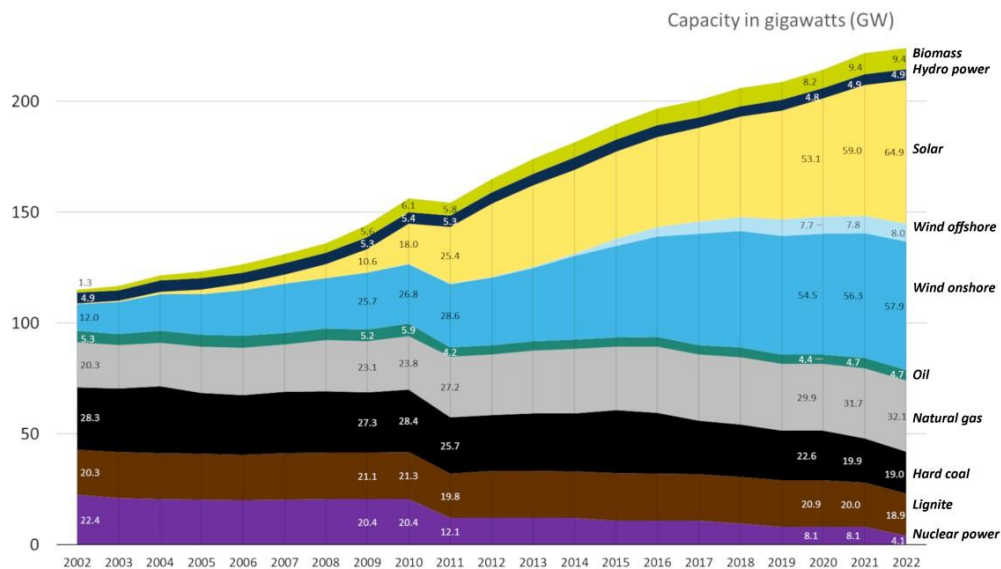
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia menjadikan transisi energi terbarukan sebagai tantangan besar di abad ke-21. Adanya penggunaan energi fosil yang meningkat dan menjadi sumber energi utama dalam roda perindustrian dan rumah tangga di dunia. Hingga kini, sumber energi listrik masih banyak menggunakan energi fosil, sehingga meningkatnya jumlah Karbondioksida (CO₂) di bumi sebagai hasil dari pembakaran tenaga fosil, yang kemudian menjadi permasalahan tersendiri. Polusi udara, termasuk emisi gas rumah kaca (GRK), berkontribusi terhadap perubahan iklim dan digunakan sebagai bagian dari transisi ke energi terbarukan. Namun, negara-negara industri lambat dalam menyadari potensi ekonomi dan lingkungan penuh dari sumber energi terbarukan seperti angin dan surya. Lambatnya penyebaran energi terbarukan disebabkan oleh kekhawatiran di negara-negara industri mengenai dampaknya terhadap perekonomian dalam negeri. Di sisi lain, kekhawatiran utama negara-negara berkembang adalah bagaimana menyediakan energi yang luas dan terjangkau.

Gambar 1. 1 Kapasitas net power generation yang terpasang di Jerman 2002-2022



Sumber : (Fraunhofer ISE 2022)

Jerman merupakan salah satu negara yang menerapkan energi terbarukan. Mengurangi produksi gas alam juga merupakan inisiatif kebijakan lingkungan di antara tujuan kebijakan transisi energi Jerman. Hal ini juga terkait dengan kebijakan Uni Eropa bagi seluruh negaranya untuk mengurangi tingkat produksi gas karbon. Energi nuklir pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an, digantikan oleh energi yang lebih terbarukan sejalan dengan target transisi energi Jerman. Selain itu, batubara merupakan sumber listrik yang telah berabad-abad menguasai sampai saat ini hingga direncanakan akan sepenuhnya dihapus pada tahun 2030. Pada tahun 1973 saat krisis minyak melanda Jerman hingga menyebabkan resesi ekonomi, pemerintah melakukan peningkatan untuk pembangunan tenaga nuklir. Namun, pada tahun 1975 para aktivis menduduki lokasi pembangunan pembangkit tenaga nuklir Whyll yang terletak di negara konservatif Baden-Württemberg dan mengakibatkan terganggunya proses pembangunan PLTN. Munculnya gerakan

anti-nuklir ini beranggapan reaktor nuklir sebagai ancaman berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan, terutama karena risiko kecelakaan berat dan pembuangan limbah radioaktif yang masih belum terselesaikan, bersama dengan ketidakpercayaan yang kuat pada pemerintahan untuk membangun "negara nuklir". Sejak adanya demonstrasi antinuklir yang dipicu oleh bencana reaktor nuklir di Three Mile Island, Chernobyl, dan Fukushima dengan keputusan Jerman untuk sepenuhnya bebas dari pembangkit listrik energi nuklir pada tahun 2022.

Dengan adanya gerakan anti-nuklir yang menghadirkan oposisi kuat, program tenaga nuklir Jerman goyah selama beberapa tahun. Gagasan meninggalkan energi nuklir secara resmi diusulkan oleh Komite *Enquete Bundestag* Jerman pada tahun 1980. Dengan gerakan anti-nuklir di Jerman serta mendapat dukungan dari seluruh arena politik Jerman hal ini menjadi salah satu faktor pendorong utama di balik terbentuknya Partai Hijau Jerman pada tahun 1980. Partai Hijau, yang sejak awal menentang penggunaan energi nuklir, didirikan pada waktu yang sama dan dengan cepat mendapatkan pijakan dalam politik Jerman. Partai tersebut pertama kali memenangkan kursi di *Bundestag* pada tahun 1983 dan pada tahun 1998 bergabung dengan pemerintahan Schröder dengan mengumumkan bahwa Jerman akan meninggalkan energi nuklir dan berinvestasi pada energi terbarukan.

Kebijakan nuklir di bawah pemerintahan Helmut Kohl masih belum jelas, tidak menarik dan tidak tegas, di tengah skandal dan insiden baru yang terus mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap industri nuklir (Radkau dan Hahn 2013, 347-353). Upaya untuk menyelesaikan konflik politik dan sosial mengenai energi nuklir mencapai puncaknya yang disebut Negosiasi Konsensus Energi di

bawah kepemimpinan Kohl dengan partisipasi dari perwakilan pemerintah federal, pemerintah negara bagian, partai berkuasa, dan perusahaan. Dalam menanggapi kontroversi yang sengit selama tiga dekade, pemerintah baru mengambil kesempatan untuk mengatur kebijakan nuklir yang bergerak.

Dalam artikel mengenai struktur peluang politik Herbert Kitschelt berpendapat bahwa sistem Jerman yang tertutup terhadap masukan politik dan lemahnya kapasitas negara memunculkan demonstrasi anti-nuklir dan gerakan masyarakat sipil lainnya yang tidak mungkin memiliki peluang karena pemerintah cenderung bertahan pada garis kebijakan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Kitschelt memperkirakan "kebuntuan politik" adalah "kemungkinan hasil" dari pilihan kebijakan publik. Konsep ini tampaknya masuk akal untuk menangkap dampak lingkungan politik terhadap pilihan kebijakan pada masa itu (Kitschelt 1986, 57-85). Demonstrasi yang menentang tenaga nuklir berlanjut sepanjang tahun 1990-an sampai pada pemerintahan koalisi yang dibentuk oleh Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau terpilih pada tahun 1998 di bawah kepemimpinan Gerhard Schröder. Pemerintahan ini menandai titik balik dalam sejarah energi Jerman dan mencapai apa yang dikenal sebagai 'konsensus nuklir'.

Energiewende menjadi awal titik balik bagi kebijakan energi Jerman, *Energiewende* merupakan kebijakan untuk mengubah sistem energi Jerman menjadi lebih efisien yang disediakan oleh sumber energi terbarukan dan tanpa pembangkit listrik dari nuklir. Dengan demikian, *Energiewende* dimaksudkan untuk menggeser Jerman menuju sistem energi bebas nuklir yang rendah karbon pada abad ini. Selain itu, Partai Hijau menuntut penghapusan bertahap batu bara

secara penuh, pengurangan emisi CO₂ dan modernisasi ekologi ekonomi. Namun, sejauh ini tuntutan mereka untuk melepas ketergantungan batu bara ditolak oleh politikus Persatuan Demokrat Kristen Jerman (CDU). Meskipun tidak berada dalam koalisi parlementer, Partai Hijau sangat terlibat dalam politik yang telah menjadi dampak federal dari bawah ke atas. Partai Hijau Jerman menjadi sebuah pragmatis yang bekerja dalam sistem untuk membentuk koalisi dengan semua pihak hingga menjadikan sebuah strategi yang mendapat penolakan oleh Partai Hijau Internasional.

Adanya kenaikan popularitas Partai Hijau disebabkan oleh perhatian yang tinggi di Jerman terhadap perubahan iklim dan kebijakan iklim partai. Secara keseluruhan, warga Jerman sangat prihatin dengan perubahan iklim dan musim panas di tahun 2018 sehingga menambah kepentingan mengenai iklim. Namun, bukti politik energi modern di Jerman sejak tahun 1998 menunjukkan hal yang sebaliknya bahwa perusahaan-perusahaan energi besar dengan sumber daya ekonomi yang besar dan koneksi politik yang kuat tidak mampu mencegah para politisi menerapkan perubahan besar-besaran dalam kebijakan energi dan iklim termasuk menutup pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mempromosikan energi terbarukan.

Pemerintah Jerman mempertimbangkan risiko energi nuklir dan memutuskan untuk mempercepat upaya melakukan transisi energi pembangkit listrik tenaga nuklir melalui pemberlakuan Undang-Undang Energi Atom, yang mulai berlaku pada bulan Agustus 2011. Namun, disisi lain Jerman masih berjuang untuk mencapai ambisi perubahan iklim dan masih tidak dapat untuk mencapai target

pengurangan emisi dalam jangka pendek. Sebagai anggota Uni Eropa, kebijakan iklim Jerman dipandu oleh Kerangka Kerja Iklim dan Energi 2020 dan 2030, Komisi Eropa mendukung peran utama Eropa dalam mengurangi emisi gas iklim dan akan menetapkan target 30% energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan jika negara lain ikut serta (European Commission 2018).

Negara anggota Uni Eropa harus menyerahkan Rencana Energi dan Iklim Nasional (NECPs) yang menguraikan rencana mereka untuk mencapai target tahun 2038. Pemerintah Jerman menyerahkan rancangan NECP ke Komisi Eropa pada bulan Desember 2018, yang menyoroti lima bidang strategi pengurangan emisi yang masih tertunda termasuk efisiensi energi (European Commission 2018).

Menurut laporan tahunan tahun 2020 *International Energy Agency* (IEA), Cina menjadi negara dengan pemanfaatan solar panel terbanyak di bumi. Total yang dimiliki 205 GW tenaga surya yang dimanfaatkan oleh Cina. Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan India menempati urutan selanjutnya. Angka penggunaan panel surya diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Tentunya ini bagian dari kemajuan dalam pembangkitan listrik dari sumber energi terbarukan. Banyak negara kesulitan dalam hal sumber energi alternatif. Namun, Jerman mengejutkan dunia dengan memasang 1,5 juta sistem fotovoltaik di beberapa pembangkit listrik tenaga surya di tahun 2014 (IEA 2020). Sejak saat itu, Jerman menjadi berambisi untuk mencapai transisi energi terbarukan. Di Jerman, sistem fotovoltaik yang terhubung ke jaringan listrik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pasokan listrik.

Energi angin dan fotovoltaik merupakan pilar penting pasokan listrik di Jerman, karena keduanya mewakili potensi ekspansi yang paling hemat biaya di bidang energi terbarukan. Berkat ketersediaan sumber energi utama terbarukan, serta kemajuan teknologi penyimpanan energi, sistem energi terbarukan dapat mencapai tingkat ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan pendahulunya yang berbahan bakar fosil atau nuklir. Pasokan listrik melalui sistem fotovoltaik yang terhubung ke jaringan listrik didukung oleh Undang-Undang Sumber Energi Terbarukan Pasokan Jaringan Listrik Nasional. Karena penggunaan bioenergi, energi panas bumi dan energi panas matahari terus meningkat, terdapat kekurangan ketentuan hukum yang memungkinkan investasi pada teknologi energi modern dan melindungi teknologi tersebut. Sehubungan dengan hal ini, kebijakan tersebut perlu segera diperbarui.

Dalam penelitian ini berfokus peran Partai Hijau dalam implementasi *Energiewende* di Jerman yang memiliki urgensi besar dalam konteks global saat ini. Sebagai pelopor dalam advokasi lingkungan dan keberlanjutan, partai ini telah membawa isu-isu energi terbarukan ke pusat perhatian politik Jerman. Dengan mempromosikan penggunaan sumber energi terbarukan dan menentang energi nuklir serta fosil, Partai Hijau telah memengaruhi kebijakan energi negara dan mengarahkan transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, kehadiran dan peran Partai Hijau menjadi krusial untuk mencapai tujuan energi bersih dan berkelanjutan. Implementasi *Energiewende* di Jerman memiliki implikasi yang signifikan, tidak hanya bagi negara itu sendiri, tetapi juga bagi Uni Eropa secara keseluruhan. Jerman

menjadi pemimpin dalam pengembangan energi terbarukan, mengarahkan negara-negara lain di Uni Eropa untuk mengikuti jejaknya. Hal ini memberikan dorongan besar terhadap tujuan bersama Uni Eropa untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa kemunculan Partai Hijau di Jerman memiliki pengaruh mengenai transisi energi serta kebijakan nasional Jerman maka hal tersebut dituangkan melalui Kebijakan *Energiewende* di Jerman. Oleh karena itu, peneliti mengangkat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana peran Partai Hijau Jerman dalam implementasi kebijakan *Energiewende*?
2. Bagaimana implikasi pada kebijakan *Energiewende* di Uni Eropa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui kepentingan Partai Hijau Jerman dalam isu lingkungan dan kebijakan *Energiewende* Jerman.
2. Memahami implikasi dari kebijakan energi Jerman pada kebijakan energi di Uni Eropa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini untuk mengembangkan kajian hubungan internasional dalam bidang politik lingkungan mengenai peran Partai Hijau di Jerman melalui kebijakan *Energiewende* dan kebijakan lingkungan tingkat Eropa. Tidak hanya itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk Mata Kuliah Studi Lingkungan Global, Peminatan Lingkungan, serta Pengantar dan Evolusi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis, yaitu: (1) Menjadi bahan bacaan bagi yang ingin mengetahui mengenai transisi energi di Uni Eropa; (2) Rujukan bagi yang menganalisa kebijakan Partai Politik dan kebijakan energi domestik Jerman; (3) Rekomendasi untuk peningkatan peran partai politik Indonesia dalam isu-isu lingkungan dan implementasi Perjanjian Paris. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan peran Partai Hijau dalam implementasinya melalui kebijakan *Energiewende* di Jerman.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan proposal skripsi dalam penelitian ini menggunakan versi daftar. Proposal skripsi ini terdiri atas empat bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang. Didalam latar belakang sendiri berisi penjelasan mengenai transisi energi terbarukan dan kontitusi partai politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah di Jerman. Disamping itu, peneliti juga memasukan upaya Jerman dalam pencapaian kebijakan *Energiewende*. Selain itu, dalam bab ini juga berisikan tujuan penelitian yaitu mengetahui dan mengidentifikasi peran partai hijau dalam implementasi kebijakan *Energiewende* dan implikasinya bagi Uni Eropa serta terdapat manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat akademis dan praktis. Dalam bab ini juga berisikan sistematika dalam penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, dan argumen utama yang menjelaskan tentang Kebijakan *Energiewende* di Jerman. Adapun kerangka teoritik yang peneliti gunakan untuk menganalisis Partai Hijau. Sementara metode penelitian menguraikan tentang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, spesifikasi penelitian, jenis penelitian objek dan subjek penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, dan teknik analisis data.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai perkembangan Partai Hijau dalam politik di Jerman yang mengusung isu lingkungan, serta implementasi *Energiewende* di Jerman maupun tingkat Eropa.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi peneliti berdasarkan hasil akhir penelitian yang telah tervalidasi menggunakan data yang dikumpulkan tentang terkait peran Partai Hijau dalam implementasi *Energiewende* di Jerman: implikasi bagi Uni Eropa. Kesimpulan dan bagian akhir dari penelitian ini juga mempertegas mengenai jawaban dari rumusan masalah.

